

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018

**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018**

**A. Misi 1:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berilmu**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial.	Menggiatkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan sosial	1. Meningkatkan upaya pendidikan keagamaan bagi masyarakat. 2. Memberikan dukungan, memfasilitasi, dan/ atau melakukan koordinasi terhadap kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.	Persentase kenaikan ZIS.	%	20,66	28,86	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan	Memberikan dukungan, memfasilitasi, dan/ atau melakukan koordinasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda	%	-	90	Program Pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pendidikan keagamaan.							
3.	Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas	Menyelenggarakan atau menyertakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dalam pemenuhan kesesuaian dengan bidang pekerjaannya	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur 2. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan standar kompetensi	1. Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas 2. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	% %	80 85	90 100	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Program Pendidikan kedinasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4.	Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi masyarakat	1. Mengoptimalkan kurikulum praktek tentang budi pekerti dan wawasan kebangsaan di sekolah	1. Melakukan penyesuaian terhadap kurikulum praktek tentang budi pekerti dan wawasan kebangsaan di sekolah, sehingga lebih aplikatif	1. Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti 2. Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah	sekolah %	- 40	30 100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah dan melakukan sosialisasi peningkatan minat baca masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah. 2. Sosialisasi secara intensif terhadap peningkatan minat baca masyarakat.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Orang	30.000	180.000	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

B. Misi 2 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar Dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal	1. Optimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peningkatkan upaya intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal.	Opini BPK atas LKPD	opini	WDP	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu	Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu dan tepat waktu beserta SOPnya	1. Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu beserta SOPnya. 2. Menyajikan publikasi atas dokumen perencanaan daerah.	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	%	80	90	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah	1. Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, serta efisiensi belanja. 2. Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.	1. Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah 2. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	% %	51 15	51 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
4.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh aparatur dan publik	1. Meningkatkan sistem informasi daerah, yang memuat data dan informasi pembangunan, serta aplikatif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah OPD yang menerapkan e-Gov (terintegrasi)	OPD	-	32	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Mengoptimalkan regulasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik							
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan setiap aspek-aspek pelayanan, guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	1. Memperoleh kategori baik dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Meningkatkan kategori kelurahan.	1. Indeks Reformasi Birokrasi. 2. Kategori Akuntabilitas Kinerja 3. Nilai Ra-rata IKM 4. Jumlah Kelurahan yang berketegori: a. Swasembada b. Swakarya c. Swadaya	Indeks Kategori Nilai Kelurahan Kelurahan Kelurahan	51,22 B B 7 21 5 -	65,27 A A 20 11 2 6	1. Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda 2. Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan
6.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak	Optimalisasi penegakan dan kepastian hukum melalui usulan atau penerbitan peraturan	1. Penegakan sistem reward and punishment sesuai regulasi yang berlaku. 2. Membangun mekanisme pengaduan publik yang aksesibel oleh publik.	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	90	90	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
7.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Meningkatkan sistem dan cakupan layanan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan. 2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 2. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 3. Cakupan penerbitan akta kelahiran 4. Cakupan penerbitan akta kematian	% % % %	78,76 90 89,19 40	98 98 98 80	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah	Meningkatkan tata kelola kearsipan daerah yang handal	1. Pemberlakuan aturan baku sistem pengarsipan.	1. Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD	-	5	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Meningkatkan pengelolaan kearsipan berbasis digital.	2. Persentase kearsipan daerah berbasis digital	%	-	20			

C. Misi 3

Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing di setiap jenjang pendidikan	Penyediaan layanan pendidikan umum, vokasional, maupun pendidikan khusus yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target pencapaian minimal pendidikan umum, kejuruan, maupun non formal. Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin. Meningkatkan perluasan memperoleh pendidikan dan ketrampilan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA. Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA ke perguruan tinggi Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 	% % % % % % Thn	99,7 98,6 100 100 <18% 20 9,53	99,95 99,7 100 100 <18% 34 9,73	<ol style="list-style-type: none"> Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pembinaan terhadap unsur aparatur pengelola sekolah. 2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peraturan, dan metode ajar yang baik.	Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2	%	9	12,5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Meningkatkan layanan terhadap ibu, anak dan bayi serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat	1. Meminimalisir angka persentase balita gizi buruk. 2. Memfasilitasi kecukupan pemenuhan gizi masyarakat pada lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas.	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 4. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Per 100.00 KH Per 1.000 KH % %	130 9,5 11 10	120 8,5 10 7	1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Anak 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3. Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
4.	Terkendalinya kasus penyakit menular.	Meningkatkan upaya dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular	1. Meningkatkan cakupan penanganan penderita penyakit menular. 2. Meningkatkan cakupan remaja yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS.	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular	%	100	100	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat.	Meningkatkan cakupan masyarakat termasuk miskin yang difasilitasi jaminan pemeliharaan kesehatan.	1. Pemberian layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. 2. Menyediakan rumah sakit atau tempat pengobatan gratis dalam layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.	1. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 2. Jumlah rumah sakit yang difasilitasi Pemda	% Unit	50 -	70 1	1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin 3. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya, Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	Melakukan pengendalian terhadap vektor penyakit	1. Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	%	-	100	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat.	Meningkatkan cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan.	Pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan.	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan	%	100	100	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam	Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah	Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat, swasta	Presentase Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri	%	5	20	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Promotif dan Prefentif Bidang Kesehatan	serta kerjasama lintas program dan lintas sector dalam mewujudkan PHBS yang konprehensif	dan pemerintah serta kerjasama lintas program lintas sector dalam mewujudkan PHBS yang konprehensif					Masyarakat		
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar.	Meningkatkan pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan kesehatan.	Pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1. Pencapaian Nilai Akreditasi	% Nilai	35 -	35 85	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	1. RSUD R. Syamsudin, SH
10.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.	Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana	Memperkuat kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.	1. Rata-rata usia nikah pertama wanita 2. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	% Org/Km tahun %	2,39 7.417,08 21,30 25,92	1,71 7.990,3 21,32 23,70	1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Program Keluarga Berencana 3. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 4. Program pelayanan kontrasepsi 5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
10.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, melalui ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.	Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.	1. Persentase anggota parlemen perempuan 2. Persentase pekerja perempuan di lembaga eksekutif 3. Persentase Angkatan Kerja Perempuan 4. Persentase realisasi	% % % %	10 14,97 35,45 50	30 16,97 35,78 80	1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Program Peningkatan	Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan				Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat	Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pembangunan ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.	Meningkatkan peran serta organisasi/ kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pembangunan.	1. Persentase Posyandu Strata Mandiri 2. Persentase LPM berprestasi	% %	9,62 58,54	60 68,29	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa /kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
12.	Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi.	Penegakan hukum implementasi RTRW dan penyediaan ruang terbuka hijau	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang serasi dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan komitmen penyediaan ruang terbuka hijau.	1. Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tata ruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang 2. Luas Ruang Terbuka Hijau: a. Hutan Kota b. Taman Kota dan Jalur Hijau c. Lahan Pemakaman	% Ha Ha Ha	60 3,18 15,00 34,20	90 11,08 17,30 34,70	1. Program Perencanaan tata Ruang 2. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3. Program pengelolaan areal pemakaman	1. Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup	1. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 2. Kantor Lingkungan Hidup 3. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.	Meningkatkan penanganan sampah, rumah tidak layak huni, dan sanitasi rumah tinggal.	1. Meningkatkan persentase penanganan sampah. 2. Meningkatkan persentase jumlah rumah layak huni. 3. Meningkatkan persentase rumah	1. Persentase Penanganan Sampah 2. Persentase Jumlah Rumah Layak Huni 3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 4. Jumlah Kampung Iklim 5. Jumlah sungai bersih	% % % Lokasi Lokasi	83,35 85,15 63,63 - 2	84,02 86,49 72,30 5 7	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program pengembangan perumahan	Lingkungan Hidup Perumahan	1. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman 2. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			tinggal bersanitasi. 4. Meningkatkan implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	dan terpelihara 6. Jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien	Lokasi	4	14	3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Permukiman 3. Kantor Lingkungan Hidup
19.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota.	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan ketersediaan listrik serta air bersih.	1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan yang baik, nyaman dan memenuhi standar keselamatan. 2. Peningkatan cakupan kelistrikan. 3. Peningkatan cakupan air bersih.	1. Persentase kondisi jalan baik 2. Persentase kondisi jalan lingkungan baik 3. Persentase rumah layak huni 4. Persentase rumah tinggal yang bersanitasi 5. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih 6. Persentase kawasan kumuh	% % % % % %	66,49 58,14 85,15 63,63 87,02 22,87	75 75,14 86,49 72,30 95,52 22,27	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program pengembangan perumahan 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Pekerjaan Umum 2. Perumahan	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.	Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi layanan lalu lintas dan angkutan jalan.	1. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah secara serasi. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas lalu lintas,	1. Persentase fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. APILL siap ATCS d. Cermin Tikungan e. Pagar Pengaman f. PJU	% % % % % %	50,00 40,00 66,67 37,50 13,00 78,75	80,00 100,00 100,00 87,50 23,00 96,84	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penegakan hukum dan disiplin di jalan.							
21	Menurunnya laju pertumbuhan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Memberikan bantuan dan meningkatkan model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/ organisasimasyarakat	Pengembangan model pemberdayaan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi penanganan layanan sosial dasar dan pembangunan fisik, pemberian bantuan terhadap kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,5	0,5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpeccil (KAT) dan PMKS lainnya	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

D. Misi 4

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya prosedur dibidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.	Penerapan prosedur dibidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, transparan, dan sesuai kaidah keilmuan sertaperaturan yang berlaku.	Penerapan ISO dalam layanan perizinan dan investasi.	Perizinan tepat waktu	%	75	80	1. Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Penyediaan informasidaerah dan menciptakan	Penyediaan informasi Investasi daerah yang handal.	1. Nilai Investasi PMA 2. Nilai Investasi	Rp (juta) Rp(juta)	45.978 125.919	9.000 137.251	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kondusifitas iklim investasi.		PMDN						Terpadu
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.	Meningkatkan fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja, dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial.	1. Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerjadengan mengikuti kebutuhan pasar. 2. Pengoptimalan fungsi Balai latihan Kerja.	Persentase tenaga kerja berbasis kompetensi	%	16	20	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Penegakan perlindungan tenaga kerja, didukung peningkatan kolaborasi dan sinergi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.	1. Penguatan pengawasan penerapan hukum perlindungan tenaga kerja. 2. Mendorong pembukaan jenis ketrampilan <i>life skill</i> lebih beragam. 3. Melakukan analisis potensi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.	Angka partisipasi angkatan Kerja	%	87,90	87,90	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Membangun sistem yang dapat menarik investasi berpotensi dalam penyediaan lapangan kerja.	Menyusun rencana aksi pengembangan investasi potensi daerah dalam penyediaan lapangan kerja.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	1.038	25.000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.	1. Meningkatkan pertumbuhan UMK M. 2. Membangun Pasar Induk. 3. Mengembangkan Pasar Tradisional.	1. Perentase peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah 2. Persentase Peningkatan	%	0,50	0,50	1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	1. Koperasi dan usaha kecil menengah 2. Perdagangan 3. Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	usaha.		4. Membangun Pusat Promosi dan Informasi.	LKM : KSP / USP Aktif 3. Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional 4. Persentase Peningkatan IKM Produktif	Unit %	- 73	1 83	Dalam Negeri 5. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi		
7.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi.	1. Meningkatkan pertumbuhan koperasi yang berkualitas. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi.	Persentase Peningkatan Koperasi aktif	%	58,50	61,00	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8.	Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM.	Pengembangan kerjasama dan pemberian bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil.	Pemberian bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil.	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan	UMK	-	1.000	Koperasi dan usaha kecil menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9.	Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif	Penanganan terhadap sengketa konsumen, fasilitasi pemasaran produk dan penataan Pedagang Kaki Lima.	1. Penyelesaian setiap sengketa konsumen. 2. Pembinaan dan fasilitasi pemasaran produk unggulan. 3. Optimalisasi penataan pedagang kaki lima.	Jumlah kawasan Penataan PKL	Kawasan	1	11	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10.	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah.	Meningkatkan pemenuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutu, aman, merata,	1. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. 2. Peningkatan ketersediaan informasi pasokan,	1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras) 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 3. Tingkat	% %	120 80	125 80	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terjangkau, berkeadilan dan berkelanjutan	distribusi, harga dan akses pangan. 3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan. 4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan. 5. Penanganan rawan pangan.	keamanan pangan						
11.	Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis.	Meningkatkan kualitas SDM agribisnis dan melaksanakan revitalisasi kelembagaan usaha bidang agribisnis	1. Peningkatan kualitas sistem penyuluhan agribisnis. 2. Peningkatan pembinaan kelembagaan usaha agribisnis	1. Persentase LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat 2. Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani	% %	20,83 11,03%	62,50 30,34	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
12.	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis.	Meningkatkan pelaksanaan revitalisasi agribisnis secara menyeluruh baik agribisnis on- farm dan off- farm	1. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana produksi. 3. Peningkatan pelatihan teknologi agribisnis. 4. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk	1. Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Tingkat penerapan sistem jaminan mutu dalam pengelolaan agribisnis perikanan 3. Provititas padi 4. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV	% % ton/ha %	- 20 6,46 -	2 75 6,78 80	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 2. Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan program penerapan teknologi peternakan 4. Program pengembangan budidaya perikanan 5. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 7. Program pengembangan kemitraan	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			agribisnis. 5. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana agribisnis.	(Nomor Kontrol Veteriner) 5. Terbangunnya Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC) 6. Produktivitas budidaya perikanan	Kawasan ton/ha	- 20,64	1 21,97			
13.	Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat	1. Sosialisasi tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi kepada masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	72	90	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
14.	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.	Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata, dengan meningkatkan pelayanan bagi wisatawan.	1. Inventarisasi potensi wisata. 2. Peningkatan pembinaan penyedia layanan bagi wisatawan di lokasi objek wisata, tempat penginapan, dan sentral perbelanjaan.	1. Waktu kunjungan wisata 2. Jumlah wisatawan	Hari Orang	3 95.700	4 125.000	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya.	Membangun gedung kesenian sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya.	Terbangunnya gedung kesenian sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	-	1	Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.	Memfasilitasi sinergi masyarakat untuk menggali dan memelihara lembaga / kelompok seni budaya.	1. Pengembangan model Pemberdayaan organisasi/ kelompok masyarakat seni budaya untuk	Jumlah event pagelaran budaya	Event	1	6	Program ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya daerah.							
17.	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.	Mewujudkan pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu dan teratur	1. Analisis stakeholder organisasi / kelompok masyarakat yang bergerak di bidang olah raga. 2. Pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat olah raga. 3. Pembinaan terhadap olahragawan berprestasi.	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/nasional	%	33,33	90%	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

E. Misi 5

Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.	1. Meningkatkan upaya mendidik masyarakat untuk berlaku tertib dan disiplin, serta menjaga ketertiban umum.	1. Peningkatan penyelesaian penanganan pelanggaran Peraturan Daerah. 2. Peningkatan kapasitas anggota Polisi Pamong Praja. 3. Peningkatan kapasitas anggota Linmas.	1. Persentase penyelesaian pelanggaran perda 2. Persentase unjuk rasa yang terkendali 3. Cakupan pengendalian keamanan lingkungan 4. Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	-	92,5	1. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. Mengoptimalkan antisipasi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 5. Optimalisasi pencegahan dan penanganan tawuran pelajar.	5. Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	%	-	50	peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparat dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana.	1. Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan masyarakat dan aparat terhadap bencana.	1. Meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat terhadap penanganan bencana. 2. Optimalisasi penanganan korban dari kejadian bencana.	1. Persentase Tingkat Kesiapan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penanggulangan Bencana 2. Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana 3. Cakupan zona tangguh bencana	% % %	1 - -	1,22 100 100	1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Meningkatnya pembinaan politik daerah, Lembaga swadaya masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.	1. Meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat, serta melakukan pendataan terhadap Lembaga swadaya masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.	1. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat. 2. Pendataan terhadap Lembaga swadaya masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada 2. Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	% %	76,79 45	78 90	1. Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Terwujudnya kerukunan antar dan antar umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama.	1. Meningkatkan peranan MUI, FKUB dan Lembaga Keagamaan lain guna meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan.	1. Melaksanakan revitalisasi peranan MUI, FKUB dan Lembaga Keagamaan lain guna meningkatkan kerukunan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan.	Persentase unjukrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	%	22,85	10	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						2013	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan.	1. Penyediaan tempat pengelolaan persampahan, baik berupa TPST, unit bank sampah dan Pengelola Daur Ulang Sampah.	1. Tersedianya tempat pengelolaan persampahan, baik berupa TPST, unit bank sampah dan Pengelola Daur Ulang Sampah pada lokasi yang representatif.	Persentase Reduksi Sampah Kota	%	1,25	4,51	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
6.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.	1. Meningkatkan eksistensi kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan.	1. Peningkatan jumlah kawasan atau lokasi yang mendapatkan penanganan khusus kebersihan dan keindahan lingkungan 2. Perluasan atau peningkatan kawasan ruang terbuka hijau 3. Menyediakan ruang untuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan secara bertahap yang berjalan di wilayah kota baru	1. Jumlah jalan tertib sampah 2. Jumlah perumahan tertib sampah 3. Persentase RTH taman kota dan jalur hijau dalam kondisi baik. 4. Luas lahan ruang pemerintahan baru	Ruas jalan Lokasi % Ha	7 4 62 -	12 9 86 7	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Lingkungan hidup 2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman. Sekretariat Daerah

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

